



Jenia Silitonga¹
 Lestari Br Tohang²
 Rio Manuel Matthew
 Siregar³
 Sarah Agustin Siahaan⁴
 Stela Tri Yuni Purba⁵
 Valentina Rentauli Br
 Siringo Ringo⁶
 Yuliana Simatupang⁷
 Taufiq Ramadhan⁸

ALL EYES ON PAPUA: POTRET KETIDAKADILAN, KRISIS IDENTITAS, DAN DISINTEGRASI DI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Abstrak

Kampanye “All Eyes on Papua” yang mencuat di media sosial sejak pertengahan tahun 2023 mencerminkan ketidakadilan dan diskriminasi yang masih terjadi di dalam kehidupan berbangsa, khususnya terhadap masyarakat Papua. Kasus ini menunjukkan bahwa tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam alinea IV UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan penerapan nilai-nilai Pancasila belum dilaksanakan secara optimal dalam menjamin kesatuan dan persatuan bangsa di tengah keberagaman yang ada. Studi ini membahas ketidakadilan sosial-politik, krisis identitas, dan potensi disintegrasi yang dialami masyarakat Papua melalui studi kasus “All Eyes on Papua”. Gerakan ini menjadi simbol perlawanan atas marginalisasi yang terus berlangsung dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penelitian ini bertujuan menganalisis ketidakadilan, krisis identitas, dan ancaman disintegrasi di Papua yang melemahkan rasa “memiliki” terhadap negara serta partisipasi warga Papua dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif melalui kajian pustaka dan studi kasus untuk menelaah keterkaitan antara persoalan Papua dengan nilai-nilai Pendidikan Kewarganegaraan sebagai upaya pencegahan disintegrasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa penyelesaian masalah Papua harus berbasis pada keadilan, pengakuan budaya, dan pendidikan kewarganegaraan yang inklusif. Kesimpulannya, nilai-nilai Pancasila perlu terus diperkuat dan diwujudkan dalam perilaku sosial untuk menjamin keadilan dan menjaga persatuan dalam masyarakat Indonesia yang beragam.

Kata Kunci: Papua, Ketidakadilan, Krisis Identitas, Disintegrasi, PPkn

Abstract

The “All Eyes on Papua” campaign that has emerged on social media since mid-2023 reflects the injustice and discrimination that still occurs in national life, especially against the Papuan people. This case shows that the national goals of the Indonesian nation as stated in paragraph IV of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the implementation of the values of Pancasila have not been optimally implemented in ensuring the unity and integrity of the nation amidst the existing diversity. This study discusses the socio-political injustice, identity crisis, and potential disintegration experienced by the Papuan people through the case study of “All Eyes on Papua”. This movement is a symbol of resistance to ongoing marginalization within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). This study aims to analyze injustice, identity crisis, and the threat of disintegration in Papua which weakens the sense of “belonging” to the country and the participation of Papuan citizens in national and state life. The method used is a qualitative-descriptive approach through literature review and case

^{1,2,3,4,5,6,7,8} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan
 email: jeniasilitongaa@gmail.com¹, lestaribrtohang@gmail.com², riomanuelmatthew836@gmail.com²,
 sarahagustinsiahaan@gmail.com³, stelapurba1@gmail.com⁴, valentinaasirs10@gmail.com⁵,
 yulianasimatupang64@gmail.com⁶, taufiqramadhan800@gmail.com⁷

studies to examine the relationship between the Papuan issue and the values of Civic Education as an effort to prevent disintegration. The results of the study show that the resolution of the Papua problem must be based on justice, cultural recognition, and inclusive civic education. In conclusion, the values of Pancasila need to be continuously strengthened and realized in social behavior to ensure justice and maintain unity in a diverse Indonesian society.

Keywords: Papua, Injustice, Identity Crisis, Disintegration, PPkn

PENDAHULUAN

Papua merupakan wilayah yang secara geografis dan politis termasuk dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), namun memiliki dinamika sosial, budaya, dan sejarah yang berbeda dibandingkan daerah lain. Sejak integrasinya ke dalam NKRI melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 yang masih menyisakan kontroversi, masyarakat Papua mengalami serangkaian tantangan, mulai dari eksploitasi sumber daya alam, konflik kekerasan bersenjata, diskriminasi rasial, hingga pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat negara. Ketimpangan pembangunan dan minimnya akses terhadap layanan dasar juga memperburuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat Papua, sehingga memperkuat kesan adanya ketidakadilan struktural yang berlangsung secara sistemik (Komnas HAM, 2023; Amnesty International, 2018).

Dalam beberapa dekade terakhir, perlawanan masyarakat Papua terhadap marginalisasi ini tidak hanya diwujudkan dalam bentuk gerakan lokal, tetapi juga melalui solidaritas global. Salah satunya terlihat dalam gerakan "All Eyes on Papua", sebuah kampanye digital yang viral di media sosial pada pertengahan tahun 2023. Gerakan ini menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan yang dialami masyarakat adat Awyu dan Moi di Papua, terutama dalam kasus perampasan tanah adat untuk konsesi industri sawit dan kehutanan. Melalui kampanye ini, masyarakat global diajak untuk memfokuskan perhatian terhadap nasib rakyat Papua yang selama ini dianggap terpinggirkan dan tak terdengar. Gerakan ini tidak hanya mencerminkan isu lingkungan dan agraria, tetapi juga memperlihatkan akar-akar masalah sosial-politik yang lebih dalam: ketimpangan relasi pusat-daerah, lemahnya perlindungan hukum, serta kegagalan negara dalam menjamin hak-hak dasar warga negara Papua.

Lebih jauh, krisis di Papua bukan hanya menyangkut masalah ekonomi atau pelanggaran HAM semata, melainkan telah berkembang menjadi krisis identitas. Banyak warga Papua merasa bahwa mereka tidak sepenuhnya diakui sebagai bagian dari identitas nasional Indonesia. Representasi negatif, stigma separatis, dan minimnya ruang untuk mengekspresikan identitas kultural memperparah keterasingan masyarakat Papua dari narasi kebangsaan. Akibatnya, muncul ketidakpercayaan terhadap negara, apatisme politik, dan bahkan tuntutan pemisahan diri dari NKRI. Dalam konteks ini, masalah Papua menjadi ancaman nyata terhadap keutuhan dan integrasi bangsa.

Padahal, sebagaimana tercantum dalam Alinea 4 Pembukaan UUD 1945, tujuan nasional bangsa Indonesia adalah "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial." Oleh karena itu, ketidakadilan yang terjadi di Papua bertentangan dengan cita-cita luhur tersebut. Negara tidak hanya berkewajiban memastikan keamanan, tetapi juga harus hadir secara adil untuk memenuhi hak-hak dasar warga Papua, baik dalam hal kesejahteraan, pendidikan, maupun pengakuan identitas sebagai wujud nyata dari komitmen konstitusi.

Permasalahan ini tentu menjadi tantangan serius bagi masa depan NKRI. Negara perlu menghadirkan pendekatan yang lebih humanis dan berkeadilan, bukan sekadar dengan kebijakan pembangunan fisik, melainkan melalui pendekatan yang mengedepankan pengakuan identitas, dialog, serta jaminan atas hak asasi manusia. Di sinilah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memegang peran penting—bukan hanya sebagai mata pelajaran normatif, tetapi sebagai instrumen strategis dalam membentuk warga negara yang inklusif, kritis, dan berkeadilan. Nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan semangat persatuan dalam perbedaan harus benar-benar diinternalisasi, termasuk dalam merespons persoalan Papua sebagai bagian sah dan setara dari Indonesia.

Fenomena ketidakadilan struktural yang dialami masyarakat Papua telah menjadi fokus sejumlah kajian ilmiah yang mengangkat relasi kuasa antara pusat dan daerah. Ramadhanas (2024) menyoroti bagaimana masyarakat adat suku Awyu dan Moi menggunakan tagar kampanye digital "#AllEyesOnPapua" sebagai instrumen perlawanan atas eksploitasi sumber daya alam, memperlihatkan keterbatasan negara dalam melindungi hak-hak konstitusional kelompok minoritas. Kampanye ini tidak hanya menjadi simbol resistensi atas ketidakadilan, tetapi juga membuka ruang artikulasi identitas Papua yang selama ini termarginalkan.

Dari perspektif psikososial, Dewi (2024) mengevaluasi kampanye "All Eyes on Papua" sebagai ekspresi kolektif yang dipengaruhi oleh fenomena Fear of Missing Out (FoMO). Analisis ini memperluas pemahaman bahwa dukungan digital terhadap Papua tidak selalu lahir dari kesadaran substansial, tetapi juga dari tren keterlibatan sosial sesaat. Hal ini menunjukkan bahwa solidaritas digital terhadap isu Papua masih belum sepenuhnya berdampak pada perubahan struktural dan kebijakan publik yang berkelanjutan.

Sementara itu, pendekatan solusi berbasis pendidikan kewarganegaraan mulai mendapat perhatian akademik. Jamal dan Timisela (2024) mengemukakan bahwa PKn berperan penting sebagai fondasi nilai hak asasi manusia di Papua, terutama dalam membentuk kesadaran hukum dan nilai-nilai kebangsaan berbasis keadilan sosial. Pandangan ini diperkuat oleh Wabiser dan Meteray (2021), yang meneliti efektivitas mata pelajaran PKn dalam Kurikulum MBKM di Jayapura. Mereka menyimpulkan bahwa meskipun PKn memiliki potensi besar dalam membangun integrasi nasional, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan metodologis dan kultural serta pentingnya pendidikan sejarah membentuk identitas nasional masyarakat Papua. Dengan menekankan sejarah lokal dan narasi Papua dalam kurikulum, mereka menyarankan pendekatan pendidikan yang lebih kontekstual dan inklusif sebagai upaya menumbuhkan rasa memiliki terhadap Indonesia.

Berdasarkan kajian-kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketidakadilan struktural dan krisis identitas yang dialami Papua bukan hanya merupakan persoalan politis, tetapi juga kultural dan edukatif. Maka, pendekatan interdisipliner yang memadukan aktivisme digital, rekognisi identitas lokal, serta pendidikan kewarganegaraan dan sejarah menjadi krusial dalam membangun integrasi Papua dalam bingkai NKRI.

Dengan latar belakang ini, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana ketidakadilan sosial-politik, krisis identitas, dan lemahnya integrasi kebangsaan di Papua dapat mengancam keutuhan NKRI. Kasus "All Eyes on Papua" menjadi titik masuk penting untuk menelaah persoalan ini secara holistik, sekaligus mencari solusi berbasis nilai-nilai Pendidikan Kewarganegaraan yang menjunjung tinggi hak, keadilan, dan persatuan bangsa, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar negara dan tujuan nasional Indonesia.

Tujuan penelitian ini mengidentifikasi bentuk ketidakadilan, krisis identitas, dan potensi disintegrasi yang dialami masyarakat Papua dan bagaimana hal tersebut memengaruhi hubungan antara Papua dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Mengetahui sejauh mana implementasi tujuan nasional yang tercantum di dalam alinea IV pembukaan UUD 1945 di Papua dan Menganalisis dan mengeksplorasi peran nilai-nilai Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai instrumen penguatan integrasi dan keutuhan NKRI.

Penulisan ini diharapkan mendorong peningkatan kesadaran publik terhadap pentingnya empati, solidaritas, dan keadilan sosial dalam merespons isu-isu kemanusiaan yang menimpa saudara-saudara di Papua. Gerakan "All Eyes on Papua" menjadi simbol yang menggugah perhatian nasional dan internasional, serta menjadi pengingat akan pentingnya menjaga persatuan melalui penghormatan terhadap hak dan martabat setiap warga negara.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji secara mendalam fenomena sosial-politik yang tercermin dalam kampanye All Eyes on Papua sebagai representasi dari ketidakadilan struktural, krisis identitas, dan potensi disintegrasi nasional. Studi ini tidak berfokus pada pengukuran angka, melainkan pada penafsiran makna, relasi antar-variabel sosial, dan konteks kultural-politik yang melingkupi masyarakat Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Data dalam penelitian ini bersifat sekunder, diperoleh melalui kajian literatur dan dokumentasi. Sumber data meliputi jurnal ilmiah nasional maupun internasional yang membahas isu Papua, keadilan sosial, identitas etnis, integrasi nasional, dan pendidikan kewarganegaraan. Selain itu, data juga diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, laporan lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta publikasi digital dan media daring yang memuat narasi kampanye All Eyes on Papua.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka yang sistematis, dengan seleksi literatur relevan berdasarkan fokus dan rumusan masalah penelitian. Seluruh data dianalisis dengan teknik analisis isi (content analysis), yaitu dengan membaca secara mendalam setiap sumber untuk mengidentifikasi kategori, tema, serta pola-pola pemikiran yang berhubungan dengan variabel penelitian. Proses analisis dilakukan secara induktif, dengan langkah-langkah berupa identifikasi isu, kategorisasi variabel utama, analisis hubungan antar-variabel, dan sintesis temuan berdasarkan kerangka teoritik yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Ketidakadilan, Krisis Identitas, Dan Disintegrasi Di Papua

1. Bentuk Ketidakadilan di Papua

Papua merupakan salah satu wilayah paling kaya sumber daya alam di Indonesia, namun juga menjadi daerah yang mengalami ketimpangan dan ketidakadilan paling nyata dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah ini menyimpan cadangan emas dan tembaga yang sangat besar, hutan tropis yang luas, serta potensi perikanan dan agraria yang melimpah. Namun kenyataannya, kekayaan alam yang luar biasa ini tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat aslinya. Masyarakat Papua, terutama masyarakat adat di pedalaman, justru menjadi kelompok yang paling terpinggirkan dalam proses pembangunan. Mereka mengalami suatu kondisi ketimpangan struktural, yakni kondisi ketika sistem sosial, ekonomi, dan politik yang ada secara sistematis merugikan kelompok tertentu. Ketidakadilan tersebut mencakup aspek sosial, ekonomi, politik, hingga kultural. Potret ketidakadilan ini tidak hanya dilihat dari keterbatasan pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari kegagalan negara dalam memenuhi hak-hak dasar dan martabat masyarakat Papua secara menyeluruh.

Sebagai salah satu provinsi yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah, Papua seharusnya dapat berpotensi besar bagi perekonomian Indonesia. Berbanding terbalik dengan kenyataan, Papua justru tercatat sebagai salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data BPS 2023, sekitar 26,03% penduduk Papua hidup di bawah garis kemiskinan, jauh di atas rata-rata nasional. Padahal, Papua menyumbang kekayaan besar bagi negara melalui sektor tambang dan energi, termasuk dari PT Freeport Indonesia. Ironisnya, masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah industri tersebut justru hidup dalam kondisi yang serba kekurangan, tanpa akses air bersih, listrik memadai, pendidikan berkualitas, dan pelayanan kesehatan yang layak. Hal ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional belum menyentuh secara merata masyarakat Papua. Daerah lain mengalami kemajuan pesat, sebagian besar wilayah Papua masih tertinggal.



Gambar 2.1 Tambang emas Freeport di Papua (Sumber: Liputan6)

Keterbatasan infrastruktur, seperti jalan dan transportasi, juga membuat sebagian besar wilayah Papua sulit dijangkau. Banyak daerah hanya bisa diakses melalui udara atau dengan

berjalan kaki sehari-hari. Hal ini berdampak langsung pada terhambatnya layanan publik dan distribusi logistik, sehingga harga kebutuhan pokok di Papua bisa lima hingga sepuluh kali lipat dibandingkan di Pulau Jawa. Ketimpangan ekonomi ini diperparah oleh kebijakan pembangunan yang cenderung top-down dan tidak berbasis pada kebutuhan lokal.



Gambar 2.2 Masyarakat terdampak kekeringan di Distrik Agandugume dan Lambewi Kabupaten Puncak Jaya Papua Tengah (Sumber: Kementerian Sosial)

Di sisi lain, pendekatan negara terhadap Papua lebih banyak didominasi oleh logika keamanan. Sejak integrasi Papua pada 1969 melalui Pepera yang kontroversial, Papua selalu menjadi wilayah dengan intensitas militer tinggi. Operasi militer dan kepolisian kerap dilakukan atas nama pemberantasan separatisme, namun seringkali menimbulkan korban sipil dan pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu contoh paling mencolok adalah konflik di Kabupaten Nduga, di mana ribuan warga sipil harus mengungsi dan mengalami krisis kemanusiaan akibat operasi militer yang berlarut-larut. Pendekatan kekerasan ini tidak menyelesaikan konflik, tetapi justru memperdalam luka sejarah dan trauma kolektif masyarakat Papua.

Tak kalah serius, masyarakat Papua juga kerap mengalami diskriminasi rasial, baik secara langsung maupun struktural. Kasus ujaran rasis terhadap mahasiswa Papua di Surabaya tahun 2019 memperlihatkan betapa kuatnya stereotip negatif yang dilekatkan pada Orang Asli Papua. Label seperti “monyet”, “kasar”, atau “terbelakang” sering muncul dalam interaksi sosial dan dalam pemberitaan media. Diskriminasi ini membuat Orang Papua merasa terasing dalam negara sendiri, memperkuat perasaan tidak diakui secara utuh sebagai bagian dari bangsa Indonesia.



Gambar 2.3 Unjuk rasa gerakan Mahasiswa Papua Anti Rasisme (Sumber: RES)

Ketimpangan politik juga menjadi bagian dari potret ketidakadilan di Papua. Pemerintah pusat masih memiliki kendali besar terhadap kebijakan pembangunan di Papua. Proses pengambilan keputusan lebih banyak bersifat top-down, di mana suara masyarakat lokal jarang didengar atau dijadikan dasar kebijakan. Meskipun Papua diberikan status Otonomi Khusus sejak tahun 2001, implementasinya tidak berjalan optimal dan masih menyisakan banyak masalah. Dana Otsus seringkali tidak transparan, dan pembangunan masih dikoordinasikan oleh pusat tanpa partisipasi aktif dari masyarakat adat. Pembentukan daerah otonomi baru (DOB) pun dilakukan tanpa konsultasi luas, sehingga memicu kecurigaan bahwa pemekaran lebih berorientasi pada kontrol politik daripada kesejahteraan rakyat. Hal ini memperkuat persepsi bahwa masyarakat Papua hanya menjadi objek kebijakan, bukan subjek yang memiliki suara dan kendali atas masa depannya.

Ketidakadilan di Papua bukan hanya bersifat material atau administratif, melainkan mencerminkan ketimpangan struktural yang melibatkan persoalan sejarah, identitas, kekuasaan, dan relasi antara negara dan warga. Tanpa penyelesaian menyeluruh yang mengedepankan keadilan, partisipasi, dan pengakuan atas hak-hak kultural dan politik masyarakat Papua, maka ketimpangan ini akan terus melanggengkan konflik, ketidakpercayaan, dan keterasingan Papua dari NKRI secara makna dan substansi.

Dalam teori keadilan sosial John Rawls, keadilan dicapai apabila institusi sosial memberikan perlindungan dan peluang paling besar bagi mereka yang paling lemah dalam masyarakat. Konsep *difference principle* menyatakan bahwa ketimpangan hanya bisa dibenarkan jika menguntungkan kelompok yang paling miskin atau rentan. Namun dalam konteks Papua, ketimpangan yang terjadi justru memperkuat dominasi kelompok luar atas masyarakat lokal. Masyarakat Papua menjadi minoritas secara struktural di tanahnya sendiri. Ketika negara membangun jalan, bandara, atau tambang tanpa melibatkan masyarakat adat, maka pembangunan tersebut justru menciptakan ketidakadilan baru. Alih-alih memberdayakan masyarakat lokal, pembangunan seperti ini hanya memperkaya investor dan elite tertentu.

Kasus terbaru yang disoroti melalui kampanye All Eyes on Papua adalah konflik agraria di Boven Digoel, di mana masyarakat adat Suku Awyu menggugat perusahaan sawit yang mengklaim wilayah adat mereka. Kasus ini menjadi simbol dari pola lama eksploitasi Papua: masyarakat adat dilucuti haknya, sumber daya alam diambil, dan pembangunan dilakukan tanpa partisipasi. Kampanye ini menjadi bentuk solidaritas publik terhadap penderitaan masyarakat Papua dan menuntut adanya keadilan struktural.

2. Krisis Identitas Masyarakat Papua

Krisis identitas masyarakat Papua merupakan persoalan fundamental yang tumbuh seiring dengan marjinalisasi sosial, budaya, dan politik yang dialami oleh Orang Asli Papua (OAP). Identitas masyarakat Papua, yang terbentuk dari nilai-nilai adat, bahasa, tanah, spiritualitas, dan relasi sosial yang khas, kini menghadapi tekanan serius akibat hegemoni negara, dominasi budaya luar, dan modernisasi yang tidak berpihak pada kearifan lokal. Krisis identitas ini tidak hanya mengikis kebanggaan sebagai OAP, tetapi juga melahirkan alienasi, keterasingan, dan keresahan kolektif terhadap posisi mereka dalam kerangka keindonesiaan.

Salah satu indikator utama krisis identitas adalah punahnya bahasa dan budaya lokal. Papua memiliki lebih dari 250 bahasa daerah, menjadikannya kawasan dengan keragaman bahasa tertinggi di Indonesia. Namun, banyak dari bahasa tersebut kini sudah tidak lagi digunakan oleh generasi muda karena sistem pendidikan formal tidak memberi ruang untuk pengajaran bahasa ibu. Kurikulum nasional tidak kontekstual terhadap budaya Papua, sehingga anak-anak belajar dengan sudut pandang luar yang tidak mencerminkan identitas mereka sendiri. Hal ini menyebabkan terputusnya pewarisan nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan sejarah lokal.

Budaya Papua juga mengalami degradasi. Tarian adat, musik tradisional, sistem kekerabatan, dan hukum adat tidak lagi mendapat tempat dalam kehidupan masyarakat modern, terutama di wilayah perkotaan. Masuknya budaya luar melalui media sosial, televisi, dan migrasi penduduk menyebabkan anak muda Papua mengalami **kebingungan identitas**. Mereka merasa tidak sepenuhnya menjadi bagian dari budaya leluhur, tetapi juga tidak diterima dalam budaya dominan. Kondisi ini disebut oleh para ilmuwan sebagai "*cultural displacement*" atau keterasingan budaya, di mana seseorang kehilangan titik pijak jati diri karena tidak memiliki ruang yang aman untuk mengekspresikannya.

Krisis identitas juga diperkuat oleh hilangnya tanah adat, yang bagi masyarakat Papua bukan sekadar ruang ekonomi, melainkan simbol eksistensi budaya dan spiritual. Dalam masyarakat adat Papua, tanah diwariskan dari leluhur sebagai bagian dari sistem sosial dan spiritual yang kompleks. Namun, ekspansi proyek-proyek nasional, industri ekstraktif, dan pemekaran wilayah mengakibatkan banyak masyarakat adat kehilangan tanah tanpa persetujuan sah atau kompensasi adil. Perampasan tanah ini, atau *land grabbing*, berdampak pada hilangnya tempat tinggal, mata pencaharian, dan identitas komunitas secara keseluruhan.

Tidak kalah penting, ekspresi identitas politik dan budaya masyarakat Papua seringkali dikriminalisasi. Simbol-simbol budaya Papua, seperti bendera Bintang Kejora atau nyanyian daerah, kerap dianggap sebagai tanda separatisme. Pengibaran bendera dalam konteks damai

pun bisa berujung pada penangkapan, intimidasi, bahkan pemenjaraan. Tokoh-tokoh Papua yang menyuarakan ketidakadilan seperti Filep Karma, Victor Yeimo, dan lainnya sering dihadapkan pada jerat hukum atas tuduhan makar. Hal ini menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya memberikan ruang aman bagi OAP untuk mengekspresikan identitas mereka secara sah dan bermartabat.

Sementara itu, sistem pendidikan, media, dan birokrasi tidak menyediakan narasi yang mendukung eksistensi identitas Papua. Sejarah Papua versi lokal jarang diajarkan di sekolah. Media nasional lebih sering menampilkan Papua dalam dua sisi ekstrem: sebagai wilayah konflik atau sebagai kawasan tertinggal, tanpa memperlihatkan dinamika sosial dan kekayaan budayanya secara utuh. Representasi sempit ini menguatkan stigma dan menambah beban psikologis masyarakat Papua, terutama generasi muda, dalam membentuk kepercayaan diri dan jati dirinya sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang setara.

Dengan demikian, krisis identitas di Papua bukan hanya masalah kehilangan budaya, tetapi juga menyangkut hilangnya ruang untuk merayakan keberbedaan. Masyarakat Papua merasa tidak dilibatkan dalam narasi kebangsaan secara adil, melainkan terus-menerus ditekan agar menyesuaikan diri dengan arus dominan yang seringkali tidak relevan dengan kehidupan mereka. Negara perlu melakukan koreksi kebijakan yang menyeluruh, memberikan ruang otonomi budaya yang lebih besar, serta mengakui secara tulus hak masyarakat Papua untuk hidup dengan identitas mereka sendiri dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Disintegrasi di Papua

Isu disintegrasi di Papua merupakan ancaman serius bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Fenomena ini bukanlah persoalan tunggal yang muncul secara tiba-tiba, melainkan akumulasi panjang dari ketidakadilan historis, krisis identitas, dan kegagalan negara dalam membangun relasi yang setara dengan masyarakat Papua. Disintegrasi dalam konteks Papua tidak hanya bersifat fisik atau teritorial, tetapi juga menyangkut keterputusan emosional, psikologis, dan ideologis antara rakyat Papua dengan identitas keindonesiaan.

Gerakan separatisme Papua, seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM), muncul sebagai bentuk ekspresi politik atas rasa ketidakadilan dan ketidakpuasan yang dirasakan masyarakat Papua sejak integrasi dengan Indonesia melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969. Proses Pepera sendiri dinilai tidak demokratis oleh banyak pihak, termasuk pengamat internasional, karena hanya melibatkan 1.026 orang yang dipilih oleh militer untuk mewakili seluruh rakyat Papua. Sejak saat itu, sebagian masyarakat Papua merasa bahwa integrasi mereka dengan Indonesia adalah bentuk aneksasi paksa, bukan pilihan bebas.

Rasa keterasingan terhadap negara semakin diperkuat oleh pendekatan militeristik yang digunakan untuk mengendalikan wilayah Papua. Kehadiran aparat keamanan dalam jumlah besar, operasi militer berkala, serta seringnya terjadi kekerasan terhadap warga sipil menumbuhkan ketakutan dan trauma kolektif di kalangan masyarakat. Hal ini menciptakan jurang emosional antara negara dan rakyat Papua, di mana pemerintah dianggap lebih memilih pendekatan kekuasaan daripada dialog kemanusiaan. Situasi ini menyuburkan narasi kemerdekaan, terutama di kalangan generasi muda Papua yang kehilangan kepercayaan terhadap negara.

Selain itu, disintegrasi juga tercermin dalam perasaan tidak setara dan tidak diakui sebagai bagian sejajar dari bangsa Indonesia. Diskriminasi rasial, stereotip negatif, dan pengabaian terhadap kebudayaan lokal menyebabkan masyarakat Papua merasa diasingkan dari ruang-ruang nasional. Mereka tidak hanya merasa dijajah secara fisik, tetapi juga secara simbolik dan kultural. Ini membentuk kondisi yang disebut sebagai "*disidentifikasi*", yaitu penolakan terhadap identitas nasional yang tidak merepresentasikan nilai, sejarah, dan aspirasi lokal Papua.

Fenomena pengibaran bendera Bintang Kejora, aksi demonstrasi damai, hingga tuntutan referendum bukan semata-mata bentuk makar, tetapi merupakan wujud dari aspirasi politik yang perlu dipahami secara kontekstual. Tuntutan ini sering muncul sebagai bentuk ekspresi terhadap kegagalan negara dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat Papua, serta keinginan untuk mendapat pengakuan atas martabat dan eksistensinya sebagai manusia dan kelompok etnis yang otonom.

Disintegrasi di Papua juga diperkuat oleh kegagalan implementasi Otonomi Khusus (Otsus). Alih-alih meningkatkan kesejahteraan dan partisipasi lokal, Otsus justru menjadi sumber kekecewaan baru karena dianggap tidak transparan, tidak berpihak pada rakyat, dan lebih menguntungkan elit politik tertentu. Pemekaran wilayah melalui pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) pun banyak ditolak karena dilakukan tanpa konsultasi luas, bahkan dianggap sebagai strategi pecah belah terhadap masyarakat adat.

Maka dari itu, upaya menjaga keutuhan NKRI di Papua tidak bisa lagi bergantung pada kekuatan militer atau pendekatan formalistik semata. Yang dibutuhkan adalah pendekatan yang menekankan keadilan restoratif, rekonsiliasi historis, pengakuan budaya, serta ruang dialog yang sejajar. Papua tidak membutuhkan janji pembangunan tanpa penghormatan terhadap kemanusiaan dan jati diri mereka. Selama ketimpangan dan ketidakadilan tetap dibiarkan, disintegrasi bukan hanya ancaman, tetapi kenyataan yang terus membayangi masa depan Papua dan Indonesia.

Implementasi Tujuan Nasional Nkri Di Papua

Sejak masa kemerdekaan, bangsa Indonesia telah menetapkan cita-cita dan tujuan nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 menegaskan tujuan nasional Indonesia yang mencakup perlindungan terhadap seluruh bangsa, kesejahteraan bangsa, pencerdasan kehidupan bangsa, dan partisipasi dalam menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial. Sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Papua memegang peran penting dalam mewujudkan cita-cita nasional yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Tujuan-tujuan ini mencerminkan komitmen negara untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat, termasuk masyarakat adat di Papua. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi tujuan ini tidak berjalan mulus. Berbagai tantangan, mulai dari kesenjangan ekonomi, dinamika keamanan, hingga persoalan budaya dan politik, turut memengaruhi bagaimana tujuan nasional diwujudkan di wilayah ini.

Sejak integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tahun 1969, kebijakan pembangunan yang diterapkan sering kali tidak mempertimbangkan hak-hak dan aspirasi masyarakat adat. Hal ini menyebabkan munculnya ketidakpuasan dan konflik berkepanjangan antara masyarakat adat dan pemerintah, serta perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut. Keterbatasan akses terhadap pendidikan, informasi, dan partisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam menciptakan kesenjangan yang signifikan, sehingga tujuan nasional yang seharusnya melindungi dan mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi tidak terwujud secara optimal di Papua.

Alinea ke-4 Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan tujuan nasional yang mencakup:

1. Melindungi Seluruh Rakyat Dan Wilayah Indonesia

Tujuan nasional untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahnya mencerminkan komitmen negara untuk menjaga hak dan kesejahteraan setiap warga negara, termasuk masyarakat adat di Papua. Namun, dalam praktiknya, perlindungan ini sering kali tidak terwujud. Papua seringkali menjadi sorotan karena isu keamanan yang kompleks. Masyarakat adat Papua menghadapi ancaman dari proyek-proyek pembangunan yang merusak lingkungan dan menghilangkan sumber daya alam yang menjadi bagian integral dari kehidupan mereka. Munculnya beberapa konflik, seperti konflik bersenjata antara kelompok separatis dengan aparat keamanan, seperti yang terjadi di Pegunungan Tengah (Intan Jaya, Nduga, dan Puncak), telah menimbulkan korban jiwa baik dari kalangan sipil maupun aparat. Misalnya, insiden penembakan terhadap pekerja proyek Trans-Papua di Nduga pada 2019 dan serangan terhadap pos-pos militer di Kiwirok (2021) menunjukkan betapa rapuhnya situasi keamanan di beberapa wilayah.

Pemerintah merespons dengan pendekatan keamanan dan dialog. Di satu sisi, operasi militer seperti Satgas Nemangkawi digencarkan untuk menertibkan kelompok bersenjata. Di sisi lain, upaya persuasif melalui dialog dengan tokoh adat dan gereja juga dilakukan. Namun, masyarakat sipil seringkali terjebak di tengah konflik, sehingga perlindungan terhadap hak-hak dasar mereka masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi negara.

Ketidakadilan dalam pengambilan keputusan mengenai penggunaan lahan dan sumber daya alam menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat masih lemah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, tetapi juga melindungi hak-hak masyarakat adat yang telah mengelola dan menjaga lingkungan mereka selama berabad-abad.

2. Memajukan Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan umum dalam kehidupan bermasyarakat merupakan salah satu tujuan utama pembangunan nasional. Papua yang kaya akan sumber daya alam seperti emas, tembaga, dan gas yang dikelola oleh usaha PT Freeport Indonesia, seharusnya termasuk dalam kategori wilayah dengan kesejahteraan paling tinggi di Indonesia. Namun realitanya, data BPS menunjukkan bahwa Papua adalah provinsi dengan tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional.

Di kota-kota seperti Jayapura dan Timika, kemewahan kompleks pertambangan kontras dengan permukiman kumuh di sekitarnya. Freeport, raksasa tambang yang menyumbang triliunan rupiah untuk negara, ternyata belum mampu mengangkat derajat hidup masyarakat asli di sekitarnya. Dana Otonomi Khusus yang seharusnya menjadi berkah, justru menjadi kisah pilu ketika korupsi menggerogoti anggaran yang ditujukan untuk rakyat. Lukas Enembe, mantan gubernur yang kini berurusan dengan hukum, hanyalah satu dari banyak aktor dalam drama korupsi yang membuat rakyat Papua terus bertanya: "Kemana larinya uang kami?"

Sejak pemerintah memberikan hak otonomi daerah kepada Papua pada tahun 2001, nyatanya hal tidak berdampak langsung terhadap kesejahteraan mereka. Pemerintah telah meluncurkan dana Otonomi Khusus (Otsus) yang mencapai puluhan triliun rupiah sejak 2001. Dana ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan Trans-Papua, puskesmas, dan sekolah. Namun, masalah korupsi dan salah urus seringkali membuat manfaatnya tidak optimal. Misalnya, kasus korupsi dana Otsus yang menjerat mantan Gubernur Papua, Lukas Enembe, menjadi bukti bahwa tata kelola keuangan masih perlu diperbaiki.

Selain itu, pembangunan ekonomi kerap tidak inklusif. Masyarakat asli Papua sering merasa tersingkirkan oleh dominasi pendatang dalam sektor perdagangan dan jasa. Program seperti Kewirausahaan Nasional (PNM) dan pelatihan UMKM memang digalakkan, tetapi masih banyak warga lokal yang kesulitan bersaing.

3. Menerdaskan Kehidupan Bangsa

Pencerdasan kehidupan bangsa merupakan tujuan yang fundamental untuk menciptakan masyarakat yang berpengetahuan dan berdaya saing. Di Papua, tantangan dalam mencapai tujuan ini sangat nyata. Akses terhadap pendidikan yang berkualitas masih terbatas, dan banyak masyarakat adat yang tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam hal pendidikan dan pelatihan. Banyak sekolah di daerah pedalaman kekurangan guru, fasilitas belajar, dan bahkan listrik. Anak-anak di pegunungan harus berjalan kaki berjam-jam untuk mencapai sekolah terdekat. Akibatnya, angka putus sekolah dan buta huruf masih tinggi.

Di pedalaman, anak-anak Papua masih harus berjuang keras untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Mereka rela berjalan berkilo-kilo meter, menyusuri jalan berbatu dan menyeberangi sungai deras, hanya untuk sampai ke sekolah yang atapnya bocor dan gurunya jarang datang. Beasiswa ADik dan program Guru Garis Depan memang telah membawa angin perubahan, tetapi masih terlalu banyak anak Papua yang terpaksa putus sekolah karena faktor ekonomi atau tekanan konflik.

Keterbatasan ini berkontribusi pada rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan di kalangan masyarakat Papua, yang pada gilirannya menghambat partisipasi mereka dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Untuk mencapai tujuan nasional ini, diperlukan upaya yang lebih besar untuk meningkatkan akses pendidikan, pelatihan, dan informasi bagi masyarakat Papua, sehingga mereka dapat berkontribusi secara aktif dalam pembangunan dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

4. Kontribusi pada Perdamaian Dunia

Tujuan untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial menuntut Indonesia untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan adil bagi semua warganya. Namun, di Papua, konflik berkepanjangan dan pelanggaran hak asasi manusia menunjukkan bahwa perdamaian dan keadilan sosial masih sulit dicapai. Masyarakat Papua sering kali merasa terpinggirkan dan tidak diakui dalam proses

politik dan sosial, yang menyebabkan ketidakpuasan dan ketegangan. Untuk mewujudkan tujuan ini, penting bagi pemerintah untuk mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dan dialogis, yang melibatkan masyarakat Papua dalam proses pengambilan keputusan dan memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati. Dengan demikian, ketertiban dan perdamaian yang diharapkan dapat tercapai, menciptakan kondisi yang lebih baik bagi semua pihak di Papua.

Sorotan global "All Eyes on Papua" yang menggema di media sosial bukanlah fenomena yang muncul tiba-tiba. Ia adalah puncak gunung es dari kegelisahan yang terakumulasi selama puluhan tahun. Tagar ini menjadi megafon bagi suara-suara yang selama ini terpendam, sekaligus cermin yang memantulkan wajah buram pembangunan di tanah yang seharusnya makmur. Pada akhirnya, implementasi tujuan nasional di Papua bukan sekadar tentang kebijakan dan anggaran., namun tentang mendengarkan suara masyarakat Papua, memahami aspirasi mereka, dan bekerja bersama untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. "All Eyes on Papua" seharusnya bukan hanya tentang menyoroti masalah, tetapi juga tentang merayakan setiap langkah kemajuan, sekecil apapun itu. Karena di balik sorotan dunia, Papua tetaplah rumah bagi jutaan orang yang berhak hidup damai, sejahtera, dan bermartabat - sama seperti saudara-saudara mereka di bagian Indonesia lainnya.

Peran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan

Kemerdekaan yang telah diraih bangsa Indonesia menandai sebuah titik awal perjalanan baru yang merupakan sebuah awal dari perjalanan panjang dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu membangun negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Pancasila sebagai dasar negara menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia juga memberikan peran dimana nilai-nilai Pancasila digunakan oleh bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita tersebut (Iriansyah, 2021).

Pendidikan Pancasila yang merupakan salah satu dari fondasi penting dalam membangun karakter generasi muda Indonesia (Amelia dkk., 2023). Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak hanya menjadi panduan moral dan etika, tetapi juga mencerminkan semangat kebersamaan dan pedoman untuk menjaga persatuan serta kesatuan bangsa. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki peran strategis dalam memperkuat identitas kebangsaan, terutama dalam konteks tantangan disintegrasi yang mengancam wilayah-wilayah seperti Papua. PPKn bukan hanya sekadar transfer pengetahuan normatif tentang negara dan ideologi, tetapi juga sarana membentuk karakter warga negara yang sadar akan hak dan tanggung jawabnya, serta memiliki rasa cinta tanah air dan sikap toleransi terhadap keberagaman.

Berikut peran penting Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam mencegah ketidakadilan, krisis identitas, serta potensi disintegrasi bangsa yang mengancam keutuhan NKRI.

1. Mencegah Ketidakadilan

Masalah ketidakadilan yang dihadapi Papua, baik itu berupa diskriminasi, marjinalisasi, maupun kesenjangan akses terhadap layanan publik, adalah tantangan besar untuk mencapai tujuan keadilan sosial yang tercantum dalam sila kelima Pancasila. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran publik tentang signifikansi keadilan, persamaan hak, dan penghormatan terhadap keberagaman. Melalui pengajaran PPKn yang relevan dan inklusif, siswa diajarkan bahwa setiap warganegara, termasuk komunitas adat Papua, berhak mendapatkan perlakuan yang adil dari negara dan masyarakat di sekitarnya.

Ketidakadilan yang dialami masyarakat Papua selama ini merupakan masalah kompleks yang bersumber dari berbagai aspek, seperti diskriminasi etnis, marjinalisasi budaya, serta kesenjangan dalam akses pelayanan publik—termasuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Ketidakadilan tersebut tidak hanya menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi, tetapi juga menimbulkan rasa ketidakpuasan dan alienasi di kalangan masyarakat Papua, yang bisa berujung pada konflik dan ketegangan sosial.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan instrumen strategis untuk membangun kesadaran dan nilai-nilai keadilan sosial di tengah masyarakat Papua. Materi PPKn yang mengajarkan nilai keadilan, persamaan hak, dan penghormatan keberagaman harus disampaikan secara kontekstual dan relevan dengan kondisi sosial di Papua. Adapun peran PPKn dalam mencegah ketidakadilan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Kesadaran Hak dan Keadilan

Dengan mengajarkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi, PPKn membantu siswa memahami pentingnya memperjuangkan hak-hak mereka secara damai dan konstruktif. Siswa diajarkan bahwa keadilan bukan hanya masalah hukum, tetapi juga moral dan sosial yang harus dijunjung tinggi oleh setiap warga.
- b. Mengintegrasikan Nilai-Nilai Lokal dalam Pendidikan

Studi Arifin (2020) menekankan bahwa pendidikan kewarganegaraan yang mengadopsi nilai-nilai lokal dan kondisi nyata di Papua akan lebih efektif. Contohnya, memasukkan nilai-nilai adat, cerita sejarah lokal, dan permasalahan sosial yang dialami masyarakat Papua dalam kurikulum PPKn akan membuat materi terasa hidup dan bermakna bagi siswa. Ini membuat siswa lebih peka terhadap ketidakadilan yang ada di lingkungan mereka dan termotivasi untuk berperan aktif mengatasi masalah tersebut.
- c. Pendekatan Pembelajaran Berbasis Pengalaman dan Masalah Nyata

Wabiser dan Meteray (2021) menyoroti pentingnya metode pembelajaran yang berbasis pengalaman langsung dan problem solving. pentingnya metode pembelajaran yang berbasis pengalaman langsung dan problem solving. Dengan demikian, siswa tidak hanya menerima teori keadilan secara abstrak, tetapi diajak untuk berdiskusi, refleksi, dan terlibat dalam kegiatan nyata yang mengangkat isu ketidakadilan di komunitas mereka. Misalnya, proyek sosial atau diskusi kelompok tentang pengalaman diskriminasi yang mereka atau orang di sekitar mereka alami.
- a. Mengembangkan Empati dan Solidaritas Sosial

Pembelajaran PPKn yang mengangkat permasalahan ketidakadilan secara nyata juga bertujuan untuk membangun empati. Ketika siswa belajar memahami dan merasakan kesulitan orang lain, mereka akan tumbuh rasa solidaritas dan keinginan untuk membantu sesama. Sikap empati ini sangat penting untuk mengurangi prasangka dan konflik antar kelompok di Papua yang beragam.
- b. Mendorong Keterlibatan Aktif dalam Perjuangan Keadilan Sosial

Pendidikan yang efektif tidak hanya menghasilkan siswa yang paham teori, tetapi juga mendorong mereka menjadi agen perubahan sosial. PPKn harus memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial, advokasi, dan upaya peningkatan keadilan di masyarakat. Hal ini akan membentuk generasi muda Papua yang tidak pasif, tetapi kritis dan bertanggung jawab dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan bersama. Melalui pendekatan yang kontekstual, inklusif, dan berbasis pengalaman nyata, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam mencegah ketidakadilan di Papua. Dengan meningkatkan kesadaran, empati, dan keterlibatan aktif siswa, PPKn berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan berdamai dengan keberagaman yang ada.

2. Mencegah Krisis Identitas

Krisis identitas yang dialami oleh masyarakat Papua merupakan hasil dari marginalisasi budaya, kurangnya pengakuan terhadap nilai-nilai setempat, serta rendahnya representasi dalam narasi kebangsaan Indonesia. Dalam konteks ini, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki peranan kunci dalam membangkitkan kembali rasa memiliki terhadap bangsa dan negara melalui metode pembelajaran yang menghargai identitas lokal. PPKn dapat menyediakan ruang belajar untuk menjelaskan bahwa keberagaman budaya adalah kekuatan bangsa, bukan alasan untuk meminggirkan. Dengan mengintegrasikan unsur-unsur lokal Papua—seperti sejarah, budaya, dan tokoh adat—ke dalam kurikulum PPKn, siswa akan merasakan bahwa identitas mereka diperhatikan dan diakui di tingkat nasional.

Krisis identitas di Papua muncul sebagai akibat dari proses marginalisasi budaya yang berlangsung lama, di mana nilai-nilai, tradisi, dan kearifan lokal seringkali kurang mendapat

pengakuan dan apresiasi dalam narasi kebangsaan yang dominan. Hal ini menyebabkan masyarakat Papua, terutama generasi muda, mengalami kebingungan dalam menentukan jati diri mereka — apakah mereka hanya orang Papua, atau juga sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ketidakjelasan identitas ini dapat memunculkan rasa terpinggirkan, alienasi, bahkan penolakan terhadap nilai-nilai nasional, yang pada akhirnya dapat mengancam persatuan dan integrasi sosial. Adapun peran PPKn dalam mencegah krisis identitas adalah sebagai berikut:

a. Menghargai dan Mengakui Identitas Lokal

PPKn dapat menjadi ruang edukasi yang menghargai keberagaman budaya dan identitas lokal Papua. Dengan memasukkan unsur-unsur lokal seperti sejarah, adat, budaya, dan tokoh-tokoh adat Papua ke dalam kurikulum, pendidikan ini tidak hanya mengajarkan nilai kebangsaan, tetapi juga mengakui dan merayakan kekayaan budaya setempat. Ini membantu siswa merasa bahwa identitas mereka dihormati dan diperhatikan secara nasional, sehingga mereka tidak merasa tersisih.

b. Mengintegrasikan Identitas Lokal dan Nasional secara Seimbang

Pendidikan PPKn yang baik mendorong siswa untuk membangun identitas yang seimbang, yakni sebagai orang Papua sekaligus warga negara Indonesia. Hal ini berarti identitas etnis dan identitas kebangsaan bukan sesuatu yang harus dipilih salah satu, melainkan dapat hidup berdampingan secara harmonis. Sikap ini penting agar siswa tidak mengalami konflik internal yang dapat menyebabkan krisis identitas. Pendidikan harus memperlihatkan bahwa keberagaman budaya merupakan kekuatan bangsa yang harus dijaga bersama.

c. Pendekatan Dialogis dan Transformatif

Arifin (2020) menegaskan pentingnya pendekatan dialogis dan transformatif dalam pendidikan kewarganegaraan di Papua. Dengan cara ini, siswa diajak untuk berdiskusi dan refleksi mengenai makna identitas dan kebangsaan dalam konteks mereka sendiri. Proses dialog memungkinkan mereka mengekspresikan pengalaman dan perasaan mereka, sekaligus belajar menerima perbedaan. Pendidikan yang bersifat transformatif juga berupaya mengubah pola pikir dan sikap siswa menjadi lebih terbuka, inklusif, dan bangga dengan identitas ganda mereka.

d. Memperkuat Rasa Kebangsaan tanpa Menghilangkan Identitas Etnis

Studi Wabiser dan Meteray (2021) menyoroti bahwa pendidikan kewarganegaraan yang relevan dengan konteks Papua dapat memperkuat rasa kebangsaan siswa tanpa mengorbankan identitas etnis. Ini sangat penting dalam membangun loyalitas ganda, yakni loyalitas terhadap kelompok budaya sendiri sekaligus kepada negara. Dengan demikian, siswa tidak akan merasa harus memilih antara identitas lokal dan nasional.

e. Menjadi Fondasi Integrasi Sosial

Ketika generasi muda Papua berhasil membangun identitas yang kuat dan seimbang, potensi konflik yang muncul dari krisis identitas akan berkurang. Rasa memiliki yang kuat terhadap bangsa Indonesia sekaligus identitas lokal akan menjadi fondasi yang kokoh untuk integrasi sosial yang harmonis. Pendidikan PPKn menjadi jembatan yang menyatukan keberagaman menjadi sebuah kesatuan yang utuh.

3. Mencegah Disintegrasi

Disintegrasi nasional di Papua menjadi ancaman serius yang muncul akibat penumpukan ketidakadilan, masalah identitas, serta kekurangan integrasi sosial-politik antara pemerintah pusat dan masyarakat setempat. Oleh karena itu, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki peran yang krusial sebagai alat pemersatu bangsa dengan menanamkan nilai-nilai dasar negara yang inklusif dan meningkatkan kesadaran kebangsaan. PPKn berfungsi untuk memperkuat rasa komitmen kebangsaan, menumbuhkan semangat persatuan, serta mengajarkan pentingnya hidup bersama dalam perbedaan. Arifin (2020) menyatakan bahwa PPKn yang disampaikan secara kontekstual dan dialogis dapat menciptakan civic disposition—yaitu sikap aktif, kritis, dan bertanggung jawab sebagai warga negara—yang sangat diperlukan untuk mengatasi perpecahan sosial di Papua. Temuan Wabiser dan Meteray (2021) juga menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan kewarganegaraan dalam mencegah disintegrasi sangat bergantung pada sejauh mana materi pelajaran mencerminkan realitas lokal, termasuk sejarah dan budaya Papua. Ketika siswa Papua merasakan penghargaan dan keterlibatan aktif

dalam pendidikan yang menghargai identitas lokal mereka, rasa memiliki terhadap negara akan semakin kuat. Oleh karena itu, melalui pendekatan PPKn yang multikultural dan berkeadilan, pendidikan dapat berfungsi sebagai langkah pencegah disintegrasi dengan membentuk generasi muda Papua yang cinta tanah air, kritis, dan berkomitmen pada keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Disintegrasi nasional adalah ancaman serius yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Di Papua, potensi disintegrasi muncul dari akumulasi berbagai masalah seperti ketidakadilan sosial, krisis identitas, dan kurangnya integrasi sosial-politik yang sehat antara pemerintah pusat dan masyarakat setempat. Kondisi ini bisa memicu rasa tidak puas, kecurigaan, dan bahkan konflik yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Adapun peran PPKn dalam mencegah disintegrasi adalah sebagai berikut:

- a. Menanamkan Nilai-Nilai Dasar Negara yang Inklusif
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berperan sebagai alat pemersatu dengan mengajarkan nilai-nilai dasar Pancasila secara inklusif. Hal ini berarti nilai-nilai tersebut disampaikan dengan menghargai keberagaman budaya, sosial, dan ekonomi masyarakat Papua, sehingga tidak terasa sebagai paksaan homogenisasi yang menyingkirkan identitas lokal. Dengan cara ini, PPKn mengajarkan bahwa NKRI adalah milik bersama, yang berdiri di atas dasar persatuan dalam perbedaan.
- b. Meningkatkan Kesadaran dan Komitmen Kebangsaan
PPKn membantu menumbuhkan rasa cinta tanah air dan komitmen terhadap bangsa melalui pendidikan yang membangun kebanggaan akan Indonesia sekaligus menghormati kekhasan Papua. Kesadaran kebangsaan ini penting untuk mengurangi sikap separatisme atau penolakan terhadap negara. Ketika siswa merasa bahwa mereka adalah bagian yang dihargai dari bangsa ini, kemungkinan untuk menolak integrasi akan berkurang.
- c. Mengajarkan Hidup Berdampingan dalam Perbedaan
Salah satu nilai Pancasila yang utama adalah hidup rukun dan toleran antarwarga yang berbeda suku, agama, dan budaya. PPKn mengajarkan pentingnya menghormati perbedaan dan mencari kesepakatan bersama. Ini sangat relevan di Papua yang multikultural dan beragam. Pembelajaran yang menekankan nilai ini dapat membentuk sikap saling menghargai dan menghindari konflik yang bisa memicu disintegrasi.
- d. Menciptakan Civic Disposition
Arifin (2020) menyebutkan bahwa pendidikan PPKn yang disampaikan secara kontekstual dan dialogis dapat membentuk civic disposition — yakni sikap warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab. Sikap ini sangat dibutuhkan agar generasi muda Papua tidak pasif, tapi menjadi agen perdamaian dan pembangun bangsa yang mampu menghadapi dan mengatasi tantangan sosial-politik tanpa harus memecah belah.
- e. Pendekatan Multikultural dan Berkeadilan
Melalui pendekatan multikultural, PPKn mengajarkan bahwa keberagaman adalah kekayaan bangsa dan keadilan sosial harus ditegakkan untuk semua pihak. Pendekatan ini menjadi landasan penting untuk mencegah sentimen diskriminasi atau ketidakadilan yang berpotensi memicu perpecahan.

SIMPULAN

Papua merupakan wilayah dengan kekayaan alam yang melimpah, namun masyarakatnya masih mengalami ketimpangan sosial dan struktural yang mendalam. Ketimpangan ini tercermin dalam tingginya angka kemiskinan, akses yang terbatas terhadap layanan dasar, marginalisasi masyarakat adat, dan lemahnya representasi politik. Krisis identitas tercermin melalui relasi antara pemerintah pusat dan daerah masih timpang meskipun otonomi khusus telah diberikan, karena pengambilan keputusan strategis masih didominasi oleh pusat dan masyarakat adat jarang dilibatkan dalam kebijakan yang menyangkut hak-hak mereka. Ancaman terhadap integrasi nasional muncul sebagai akibat dari ketidakadilan ini, yang memicu tumbuhnya sentimen separatis, aliansi budaya, dan lemahnya kepercayaan masyarakat Papua terhadap negara. Kampanye All Eyes on Papua menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan ini, serta menunjukkan peran media sosial sebagai alat advokasi digital yang

efektif dalam membangun solidaritas publik dan memberi tekanan moral kepada pemerintah dan korporasi.

Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran penting dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa, termasuk konflik yang terjadi di Papua. Nilai-nilai seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, serta keadilan sosial harus diterapkan secara nyata agar permasalahan seperti ketimpangan pembangunan, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia di Papua dapat diselesaikan secara adil dan damai. Kondisi di Papua mencerminkan bahwa implementasi Pancasila belum sepenuhnya merata, sehingga diperlukan kesadaran kolektif untuk mewujudkan keadilan sosial di seluruh wilayah Indonesia. Melalui metode case method, mahasiswa dilatih untuk berpikir kritis dan menganalisis kasus-kasus nyata, termasuk isu Papua, dengan pendekatan yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila. Metode ini mendorong mahasiswa untuk tidak hanya memahami teori, tetapi juga turut peduli terhadap realitas sosial yang ada di sekitarnya. Dengan demikian, pendidikan yang menggabungkan pemahaman Pancasila dan pembelajaran kontekstual mampu membentuk generasi muda yang sadar akan tanggung jawabnya dalam menciptakan bangsa yang lebih adil, damai, dan bersatu.

DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty International. (2018). Indonesia: Don't bother, just let him die – Killing with impunity in Papua.
- Anugerah, B. (2019). Papua: Mengurai Konflik dan Merumuskan Solusi. *Jurnal Lemhannas RI*, 7(4), 51-65.
- Arifin, Prof. Dr., S.H., M.Pd. & Nur'arif, M. I. (2024). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Membangun Karakter Bangsa. Yogyakarta: Deepublish.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. (2023). *Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Papua, 2023*. Diakses dari <https://papua.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDQjMg==/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota.html>
- Defi, A. M. (2021, 19 Mei). Ketidakadilan sebagai masalah sosial. Sosiopedia. URL: <https://sosiopedia.com/ketidakadilan-sebagai-masalah-sosial/>
- Dewi, A. N. B. (2024). Viralnya Kampanye “All Eyes on Papua” Terindikasi FoMO. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 6411–6422.
- Djo, D. B. G. (2019). Ambivalensi Tindakan Represif Negara Atas konflik Papua. *Masyarakat Indonesia*, 45(1), 19-32.
- Haridian, M. R., Nurcahyono, O. H., & Pranawa, S. (2019). Strategi Adaptasi Mahasiswa Asal Papua di Universitas Sebelas Maret. *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 1(2), 152-159.
- Hasan, H., & Nugroho, Z. (2022). Menuju Papua Damai dengan Pendekatan Pembangunan Inklusif. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 56-66.
- Hasibuan, J. (2022). Distingsi Pengelolaan Konflik Papua Yang Tidak Pernah Selesai. *Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial*, 6(1), 69-84.
- Jamal, O., & Timisela, M. (2024). Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Sebagai Tiang Hak Asasi Manusia di Papua. *ENGGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya*, 1(2).
- Komnas HAM. (2022 & 2023). Laporan Tahunan Pelanggaran HAM di Papua dan oleh Aparat Negara.
- Kuswanto. (2023). Identitas Nasional di Era Globalisasi. Malang: Inara Publisher.
- Lopulalan, J. E. (2018). Jati diri orang asli papua dalam pusaran otonomi khusus di Provinsi Papua Barat. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 15(1), 37-49.
- Mambraku, N. S. (2016). Penyelesaian Konflik di Tanah Papua dalam Perspektif Politik. *Kajian*, 20(2), 75-85.
- Moko, R., & Mokoginta, M. (2019). Perspektif Disintegrasi Bagi Mahasiswa Papua Di Gorontalo. *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*, 8(2).
- Ramadhanas, F. (2024). Aksi Kolektif di Dunia Digital: #AllEyesOnPapua dan Perjuangan Masyarakat Adat Suku Awyu dan Moi atas Hutan Adat. *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 11(2).
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.

- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40688/uu-no-39-tahun-1999>.
- Rumkabu, E. (2022). Analisa Dampak Pembangunan terhadap Identitas dan Resistansi Papua. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 39-55.
- Sari, M., & Sundawa, D. (2025). Disintegrasi Nasional Dalam Perspektif Filsafat Pancasila. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 13(1), 35-43.
- Sudira, I. N. (2022). Resolusi Konflik sebagai Jalan Perdamaian Di Tanah Papua. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 82-95.
- Suryawan, I. N. (2015). Identitas yang Terpecah dan Peluang Transformasi Sosial Budaya di Tanah Papua. *Kawalu*, 2(1), 16-41.
- Tajfel, H., Turner, J. C., Austin, W. G., & Worchel, S. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. *Organizational identity: A reader*, 56(65), 9780203505984-16.
- UU RI No. 21 Tahun 2001. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
- Wabiser, Y. D., & Meteray, B. (2021). Keefektifan Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum MBKM di Kota Jayapura. *ENGGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya*, 1(2), 99–103.
- Widjojo, M. S., Elizabeth, A., Al Rahab, A., Pamungkas, C., & Dewi, R. (2010). Papua road map: Negotiating the past, improving the present, and securing the future. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Wulandari, A. T., Panggabean, S. A., Mubarak, F., & Antoni, H. (2025). Efektivitas Pendidikan Pancasila Bagi Generasi Z Dalam Mencegah Disintegrasi Sosial Di Era Digitalisasi. *Journal of Student Research*, 3(1), 206-216.